

**wFENOMENA PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH ANGGOTA TNI DI
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA PRESPEKTIF *FIQH SIYĀSAH*
*IDĀRIYAH***

SKRIPSI

Oleh

Arfalin Adinia

NIM. 05010420002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfalin Adinia
NIM : 050104020002
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Fenomena Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota
TNI di Lembaga-Lembaga Negara Prespektif *Fiqh*
Siyāsah Idāriyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Arfalin Adinia

NIM. 050104020002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

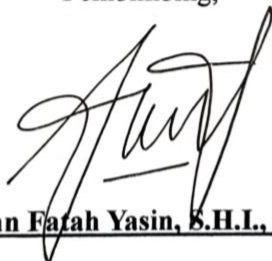
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Arfalin Adinia
NIM. : 05010420002
Judul : Fenomena Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI Di
Lembaga-Lembaga Negara Prespektif *Fiqh Siyāsah*
Idāriyah

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Mei 2024

Pembimbing,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

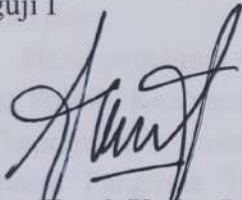
Nama : Arfalin Adinia

NIM. : 05010420002

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

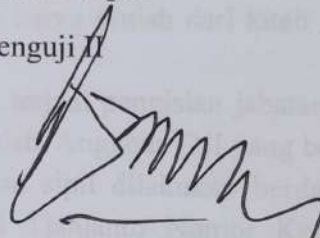
Penguji I



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP. 198905172015031006

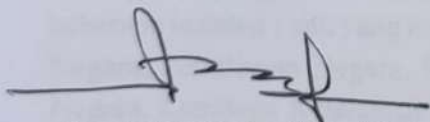
Penguji II



Dr. Lutfil Ansori, M.H.

NIP. 198311132015031001

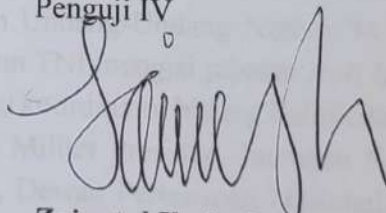
Penguji III



Dr. Arif Wijaya, S.H., M. Hum

NIP. 197107192005011003

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 12 Juni 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Saiful Anwar Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arfalın Adinia
NIM : 05010420002
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah & Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : arfalınadınıaaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Fenomena Pembelian jabatan sipil oleh anggota TMI di Lembaga-
Lembaga Negara Perspektif Fiqh Siyasah Idariyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(ARFALIN ADINIA)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berjudul “Fenomena Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI di Intansi Kementerian Prespektif *Fiqh Siyāsah Idāriyah*” yang bertujuan menjawab rumusan masalah berisi pertanyaan tentang : 1) Bagaimana fenomena pengisian jabatan sipil oleh anggota TNI 2) Bagaimana Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah Idāriyah* terhadap pengisian jabatan sipil oleh TNI.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*stattute approach*), bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara (ASN) serta bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dari kitab *Fiqh Siyāsah Idāriyah* dan

Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi pengisian jabatan sipil di luar Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan oleh Anggota TNI yang berstatus dinas aktif keprajuritan. Praktik pengisian jabatan sipil dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Nomor Kep/435/V/2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI, bahwa terdapat temuan dalam penempatan Anggota militer dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Praktik tersebut merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang tidak memperbolehkan TNI mengisi jabatan sipil kecuali untuk beberapa instansi yaitu yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelejen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik Nasional dan Mahkamah Agung. Dalam menduduki Jabatan TNI diperbolehkan mengisi jabatan sipil setelah menjadi purnawirawan atau mengundurkan diri dari dinas aktif keprajuritan. Dalam analisis *Fiqh Siyāsah Idāriyah* menyatakan proses pelaksanaan *Diwan* di Indonesia yang mengatur *An-Nidham Al-Harby* (organisasi ketentaraan) tidak sesuai, antara proses pelaksanaan penunjukan serta pengangkatan militer dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pengisian jabatan sipil yang terjadi di Lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara. TNI diharapkan dapat memaksimalkan pembinaan karier di lingkungan TNI, meningkatkan kapasitas TNI untuk melakukan pertahanan yang mumpuni, Alutsista dimodernisasi dan mengutamakan kesejahteraan prajurit.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASILAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Definisi Oprasional.....	14
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	24
KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	24
A. Kedudukan TNI dalam Sistem Ketatanegaraan	24
B. <i>Fiqh Siyāsah Idāriyah</i>	29
BAB III	36
FENOMENA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL	36
A. Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI.....	36

1. Kementerian	38
B. Dwifungsi dan Reposisi Peran TNI.....	50
BAB IV	55
ANALISIS PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH ANGGOTA TNI DI	
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.....	55
A. Analisis Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI di Kementerian Tinjauan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.....	55
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Idāriyah</i> Terhadap Pengisian Jabatan Oleh TNI Di Lembaga-Lembaga Negara.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kementerian NRI Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.....	39
Tabel 2. Praktik pelanggaran Anggota TNI menduduki Instansi Kementerian	44
Tabel.3 Anggota TNI yang merangkap di Perusahaan BUMN	50



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A. Henderson & T. Parsons., trans. oleh. *The Theory of Social and Economic Organization: Max Weber*. New York: Oxford Univ. Press, 1947.
https://ia804503.us.archive.org/32/items/weber-max.-the-theory-of-social-and-economic-organization-1947_202106/Weber%2C%20Max.%20-%20The%20Theory%20of%20Social%20and%20Economic%20Organization%20%5B1947%5D.pdf.
- Abdul Jafar, Wahyu. “*Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.*” *Al-Imarah* 3. No.1 (2018).
- Ady Thea DA. “*Sejumlah Alasan YLBHI Tolak Wacana Usulan Revisi UU TNI,*” 8 Agustus 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-alasan-ylbhi-tolak-wacana-usulan-revisi-uu-tni-lt62f07eda1a59e/>.
- Agus Subagyo, Arman. “*Profesionalisme TNI.*” *FISIP UNJANI Cimahi*, 2013, 16.
- Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh. “*Ushul al-Idariyah asy-Sayariyah.*” *Bayt ats-Tsaqifah*, cetakan I, 2003.
- Hendrik Kurniawan “*Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Mekanisme Pengangkatan Anggota TNI POLRI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil Penjabat Kepala Daerah-UINSA.pdf,*”.
- A.R., M. Yusuf. “*Implikasi Reposisi Militer Pasca Orde Baru Terhadap Ketahanan Nasional.*” *GANEC SWARA* 16, no. 1 (4 Maret 2022): 1273.
<https://doi.org/10.35327/gara.v16i1.262>.
- Asshiddiqie, Dr Jimly, dan M Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan pertama, Juli 2006. Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 6.
www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Astungkoro dan Hermawan. “*Kala Brigjen TNI Jadi Stafsus Menparekraf.*” *Republika* (blog), 26 Mei 2021.
<https://news.republika.co.id/berita/qtpejj354/kala-brigjen-tni-jadi-stafsus-menparekraf-part1>.
- Bachtiar. “*Mendesain Penelitian Hukum*”. Deepublish, 2021, 2021.

- Dini, Tuti. "*Metode Penelitian strategi menyusun tugas akhir*". Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Fahmi, Mutiara. "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran.*" *Petita* Jilid 2 Nomor 1, no. Ilmu Hukum dan Syariah (4 Januari 2017). <https://doi.org/10.22373>.
- Fitri, Aulia. "*Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil Dan Reformasi TNI*" Vol. XI, No.04, No. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Februari 2019): 25–30.
- Gama, Serafica. "*Apa Arti Dwifungsi ABRI?*" *Apa Arti Dwifungsi ABRI* (blog), 31 Desember 2020. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/31/121151169/apa-arti-dwifungsi-abri>.
- Gamaliel, Nicholas, Rainja. "*Kemunduran Reformasi: Dwifungsi TNI-Polri.*" *Kementrian Sosial Politik BEM USD 2021*, 2019.
- H. Ahmad, Sukardja. "*Hukum tata negara & hukum administrasi negara dalam perspektif fikih siyasah / H. Ahmad Sukardja*". Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=52362&pRegionCode=JI UNMAL&pClientId=111>.
- Hafid et. al. *Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Militer*. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia, 2022.
- Hi, Riyandi S. "*Ilmu Fiqih Dan Faktor Perbedaan Pendapat*" 1 (2012).
- Ibn, Abidin. *Radd al-mukhtar 'ala al-durr al-mukhtar*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003. http://catalog.uinsby.ac.id//index.php?p=show_detail&id=9439.
- Ibrahim, Hasan. *Hukum Administrasi Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group, 2004.
- Iis Ginarsah, dan Reine Prihandoko. "*Tilik Data 'Pola Mutasi Perwira Tinggi TNI, 2014-2022.*" Lab 45, 17 Februari 2022. <https://www.lab45.id/publikasi/download/168/pola-mutasi-perwira-tinggi-tni-2014->

- Muhamad Zainuddin. *Metodologi penelitian*. Surabaya: Airlangga University Press, 2011, t.t.
- Muhammad Adlan Kamil, A Salman Maggalatung, Feni Arifiani. “*Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.*” *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* Vol 4, no. issue 2 (2022): 308.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2014, t.t.
- Najdib, Ahmad, dkk. “*Ketika Moncong Senjata ikut Berniaga.*” Penelitian keterlibatan militer dalam bisnis di Bojonegoro, Boven digoel dan Poso. Jakarta: Komisi untuk orang-orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS), 2004.
- N.E. Algra, H.R.W. Gokkel. “*Fockema Andreae’s rechtsgeleerd handwoordenboek.*” Dalam *Kamus istilah hukum*, 709. R 340.03 ALG kt. Bandung: Binacipta, 1983. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=95686>.
- Novavah, Muhammad Hendrik. “*Analisa Yuridis Undang-Undangno. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Dan Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Lembaga Kepemerintahan Negara,*” no. 34 (2004).
- “Peraturan Pangllma Tentara Nasional Indonesia Nomor 174 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum di Lngkungan Tentara Nasional Indonesia,”.
- “Peraturan Menteri pertahanan Nomor 38 tahun 2016,”.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Edisi revisi, Cetakan ke-14 Mei 2019. Jakarta: Kencana, 2019, t.t.
- Rahman. “*Jonan Melantik TNI Aktif, KASN: Tidak Bisa Seenaknya.*” *Riau Mandiri* (blog), 26 September 2019. <https://www.riaumandiri.co/read/detail/74731/jonan-melantik-tni-aktif-kasn-tidak-bisa-seenaknya>.
- Raisul Muttaqien, trans. oleh. *Teori umum tentang hukum dan negara; Hans Kelsen (General theory of law and state)*. Cetakan X : September 2018. Seri filsafat hukum abad XX. Ujungberung, Bandung : Nusamedia, 2006, t.t.
- Rivera, Valdo. “*Universitas Lampung Fakultas Hukum 2018,*” t.t.

- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Cet. 1. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
http://catalog.uinsa.ac.id/index.php?p=show_detail&id=92533&keywords
 =.
- Suhantoyo. “*Profesionalisme TNI*,” no. perkembangan profesionalisme TNI AD di era reformasi. (t.t.): 1–16.
- Tangguh Chairil,. “*TNI–Polri Aktif Rangkap Jabatan: Problematik*.” *Centre for Business and Diplomatic Studies* Vol 1, no. Kontemporer Hukum (Juli 2020): 8.
- Tompkins, Jonathan. *Organization Theory and Public Management Wadsworth cengage Learning*. Berilustrasi. Universitas Indiana: Thomson Wadsworth, 2005.
https://books.google.co.id/books/about/Organization_Theory_and_Public_Managemen.html?id=tVHuAAAAMAAJ&redir_esc=y.
- Tranggana, angga ulung. “*Aroma Militer di KKP Menguat, Sakti Wahyu Trenggono Lantik Adin Nurawaluddin sebagai Dirjen PSDKP*.” *RMOL.ID* (blog), 16 Agustus 2021. <https://rmol.id/politik/read/2021/08/16/500700/aroma-militer-di-kkp-menguat-sakti-wahyu-trenggono-lantik-adin-nurawaluddin-sebagai-dirjen-psdkp>.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.pdf.”
- “Undang-Undang No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara.pdf.”
- “Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang TNI.”
- “Undang-Undang No 20 tahun 2023 tentang ASN”.
- Wahyono, Edi. “*Gerilya Militer di Kementerian dan Lembaga Sipil*.” *DetikX*, 24 Mei 2023. <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230524/Gerilya-Militer-di-Kementerian-dan-Lembaga-Sipil/>.
- Yosarie, Ikhsan, dan Ismail Hasani. “*Ringkasan Eksekutif Jalan Sunyi Reformasi Tni*.” *Human Security dan Security Sector Reform SETARA Institute* (blog), 8 Oktober 2019. <https://setara-institute.org/jalan-sunyi-reformasi-tni/>.
- Yosarie dan Kosandi. “*Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi*.” *Journal of Religion and Society*, 5

(2), no. Rangkap Jabatan (2023): 82–94.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

Yusri Munaf. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Cetakan Pertama. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A